

KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN

Alimur Rahman¹; Moh. Faisol²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
Jln. Raya Sumenep Pamekasan Km. 05 Patean Sumenep, 69451, Indonesia
E-mail : faisol114@wiraraja.ac.id (Correspondence Author)

diterima: 26/12/2021; direvisi: 20/3/2022; diterbitkan: 26/3/2023

Abstract: The aims of this research to examine the influence of the competence of village officials and the leadership of the village head on the implementation of budget refocusing in the village government in Sumenep Regency. The sample of this research is 106 respondents obtained by using purposive sampling. To analyze the data using multiple linear regression with SPSS. The results of this study indicate that the competence of village officials influences the implementation of budget refocusing in village governments in Sumenep Regency. This means that the better the level of competence of village officials such as the level of education, experience, and attitudes possessed, the better the implementation of budget refocusing is carried out, so that it becomes evidence of the village government's performance in implementing each policy. And the leadership of the village head has no effect on the implementation of budget refocusing at the village government in Sumenep Regency, this is cool because the village head leadership does not have the authority to refocus the budget. Because budget refocusing is a rule directly from the central government, and the role of the village head is only to order and supervise his subordinates to carry out the policy. So that this makes the village head's leadership have no effect on the implementation of budget refocusing on the village government. The implication of this research is that the competencies possessed by village officials such as education level, technical experience, and creativity are major capital in implementing a policy and completing work to obtain maximum results.

Keywords: *Budget refocusing; village apparatus competence*

PENDAHULUAN

Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (Covid 19)* yang semakin meningkat secara drastis membawa atmosfer baru dalam tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi dengan dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional. Dalam menjalankan mandat Keppres No. 12 Tahun 2020 Pemerintah Daerah menetapkan menerapkan salah satu kebijakan fungsional yang mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2020, di mana pemerintah daerah masing-masing diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan alternatif dalam melakukan penanganan *covid 19*. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan *covid 19* di masing-masing

daerah karena memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah *refocusing* anggaran (Feld et al., 2018), yaitu dengan melakukan *refocusing* kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk penanganan *covid 19* serta melakukan realokasi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa (Rachmadani et al., 2022) yang seharusnya dilakukan. *Refocusing* anggaran sebagai alternatif dalam mengurangi dampak besar dan berkelanjutan akibat *covid 19*, sehingga mata rantainya mampu diputus dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penyediaan alat-alat fasilitas kesehatan, pemberian bantuan bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan karena *covid 19*, dan

bentuk lainnya. Sehingga masyarakat terlindungi dari dampak pandemi *covid 19*.

Implementasi *refocusing* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa tentunya membutuhkan kemampuan secara teknis yang dimiliki oleh pegawai ataupun perangkat sebagai pelaksana. Kompetensi perangkat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan *refocusing* anggaran, mengingat akan melakukan perubahan anggaran yang seharusnya digunakan untuk belanja infrastruktur (misalnya) harus dikurangi bahkan ditiadakan, untuk kegiatan penanganan *covid 19*. Lebih dari itu adalah terkait dengan pelaporan penggunaan dananya, yang *notabane* nya para perangkat belum melakukannya sebelumnya. Hasil riset menyatakan bahwa kompetensi perangkat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019), penerapan anggaran (Saputra & Tama, 2017), dan penyerapan anggaran (Syarifuddin & Sjarlis, 2022).

Selain kompetensi perangkat, implementasi *refocusing* anggaran selama pandemi *covid 19* adalah kepemimpinan kepala desa. Kepemimpinan kepala desa yang piawai tentunya akan dengan cepat mengambil keputusan dan membuat kebijakan serta program-program inovatif dalam penanganan *covid 19* sesuai dengan kondisi daerahnya. Namun hal tersebut tentunya berbeda jika kepemimpinan kepala desa yang miskin inovasi tentunya hanya mengikuti intruksi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, dan bahkan lambat dalam merespon adanya *refocusing* anggaran, sehingga implementasi *refocusing* anggaran yang dilakukan tidak efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Hulu & Rahim (2022) menyebutkan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap

pengelolaan dana desa (dalam hal ini menggunakan implementasi *refocusing* anggaran), dan efektifitas pengelolaan dana desa (Sriani, 2021).

Dua faktor yang diuraikan di atas yaitu kompetensi perangkat desa dan kepemimpinan kepala desa dalam penelitian ini diproyeksikan akan mempengaruhi implementasi *refocusing* anggaran menjadi hal menarik untuk dilakukan penelitian. Mengingat, penelitian sebelumnya (Masruhin & Kaukab, 2019; Saputra & Tama, 2017; Syarifuddin & Sjarlis, 2022) fokus pada pengelolaan, penerapan, dan penyerapan dana desa. Sementara Hulu & Rahim (2022) dan Sriani (2021) menggunakan variabel kepemimpinan kepala desa terhadap pengelolaan dan efektifitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, implementasi *refocusing* anggaran tetap dalam konteks pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menghadapi *covid 19*. Mengingat adanya *refocusing* anggaran ini tentunya juga rentang adanya kecurangan (Patty & Ardini, 2021; Zakariya, 2020).

Implementasi *refocusing* anggaran ini dilakukan penelitian pada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sumenep. Di mana Kabupaten Sumenep menyiapkan sekitar Rp. 95 M untuk penanganan *covid-19*, dengan tiga bidang prioritas yakni bidang kesehatan, bidang perekonomian menengah dan UMKM dan bidang jaring pengaman sosial (JPS) atau bidang sosial. Namun, penyerapan dana *covid 19* di kabupaten sumenep sangatlah minim, minimnya penyerapan dana *covid 19* di Kabupaten Sumenep bisa karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintahan pusat pada pelaksana atau pemakai anggaran dana *covid 19* tersebut, salah satunya di bidang sosial yang senada dengan pengakuan dari kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Moh. Ramli bahwa untuk pencairan dana di tahap pertama belum ada desa yang merealisasikan

bahkan masih ada yang fokus menyusun APBDes (koranmadura.com). Kondisi tersebut yang menjadi alasan pemerintah desa di Kabupaten Sumenep menjadi objek penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Ajzen (1991) menyatakan bahwa *theory of planet behavior (TPB)* menjelaskan niat yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi perilaku. Adapun faktor-faktor yang membentuk niat, terdiri dari *control belief*, *normative belief*, dan *behavioral belief*. Kerja teori ini terbatas pada saat perilaku manusia dalam kondisi rasional, sedangkan ketika dalam kondisi emosi maka perilaku yang dihasilkan tidak dapat dijelaskan (Zhang, 2018). Dalam konteks penelitian ini, kompetensi perangkat desa dan kepemimpinan kepala desa menjadi bagian dari niat dalam melakukan implementasi *refocusing* anggaran yang ada di pemerintah desa. Karena kinerja atas keberhasilan implementasi *refocusing* anggaran ditentukan pelaksanaannya yaitu perangkat dan kepala desa.

Refocusing Anggaran merupakan proses pengalokasian penggunaan anggaran dari yang seharusnya sudah dianggarkan, seperti realokasi anggaran infrastruktur untuk pembelian alat fasilitas kesehatan karena kondisi *covid 19*. Sebelum pandemi *covid 19*, *refocusing* anggaran dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga stabilitas keuangannya karena kondisi keterpurukan ekonomi (Brigham & Houston, 2006), mengalami krisis akibat kondisi global (Junaidi et al., 2020), dan dampak kebijakan yang tidak tepat (Kartika, 2021). Sehingga kondisi tersebut perlu pengendalian yang baik agar mampu kembali pada kondisi normal. Indonesia mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang “Refocusing Kegiatan dan

Realokasi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid 19*”.

Implementasi kebijakan merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan (Hasman, 2015). Van Meter & Van Horn (1975) mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ataupun keputusan lainnya (Sabatier & Mazmanian, 1979). Implementasi kebijakan dalam konteks penelitian ini adalah implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pencegahan covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh seluruh elemen pemerintah, termasuk pemerintah desa. Pada hakekatnya implementasi kebijakan ini terdiri dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Winarno, 2007).

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan (Bulturbayevich et al., 2021), dan sikap kerja (Rosmaini & Tanjung, 2019). Hasil dari kompetensi yang dimiliki oleh seseorang akan menghasilkan kinerja yang maksimal atau sukses (Sedyastuti et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, kompetensi perangkat desa adalah kemampuan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada seorang perangkat desa untuk menjalankan tugasnya dalam mengimplementasikan *refocusing* anggaran pada pemerintah desa. Kualitas kompetensi yang dimiliki perangkat desa akan berpengaruh pada implementasi *refocusing* anggaran yang dilakukan (Masruhin & Kaukab, 2019)

Kepemimpinan merupakan proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk melakukan dan memahami sesuatu (Suryadi, 2010) dalam

rangka mencapai suatu tujuan (Mitchell & Scott, 1987). Sehingga kepemimpinan dalam suatu organisasi menjadi kunci penting dalam mengelola dan mengatur organisasinya (Shahbal et al., 2022). Dalam hal ini adalah kepemimpinan kepala desa mengatur dan memberikan pemahaman kepada perangkatnya dalam mengimplementasikan *refocusing* anggaran. Mengingat kewenang penuh dalam implementasi *refocusing* anggaran pada pemerintah desa berada di bawah kewenangan kepala desa. Sikap kepemimpinan kepada desa yang responsif akan mempercepat implementasi *refocusing* anggaran. Begitu juga dengan inovasinya, akan menawarkan berbagai kegiatan dan alternatif dalam rangka *refocusing* anggaran.

Kompetensi perangkat desa berperan vital dalam proses implementasi *refocusing* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tingkat kompetensi yang dimiliki tentunya akan berpengaruh terhadap hasil dari implementasi *refocusing* anggaran, semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa, baik pengetahuan, pengalaman, dan sikap serta pemahaman akan pelaksanaan *refocusing* anggaran maka semakin baik implementasi yang dihasilkan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruhin & Kaukab (2019), Saputra & Tama (2017), Syarifuddin & Sjarlis (2022) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2018) bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka kompetensi berpengaruh terhadap implementasi *refocusing* anggaran.

Berbagai kebijakan dan program yang ada di pemerintah desa banyak bergantung pada kepemimpinan kepala desa, sehingga kepala desa memiliki peran strategis dalam hal ini adalah implementasi *refocusing* anggaran.

Kepemimpinan kepala desa yang responsif dan inovatif akan serta didukung kemampuan yang memadai akan mempercepat proses implementasi *refocusing* anggaran yang akan dilakukan. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh beberapa scholar (Masruhin & Kaukab, 2019; Saputra & Tama, 2017; Syarifuddin & Sjarlis, 2022) dan penelitian relevan lainnya (Hulu & Rahim, 2022; Sriani, 2021) bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (Jogiyanto, 2010; Sugiyono, 2017) yang bertujuan untuk menguji kompetensi perangkat desa dan kepemimpinan kepala desa terhadap implementasi *refocusing* anggaran pada pemerintah desa di Kabupaten Sumenep. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di Kabupaten Sumenep sebanyak 330 desa dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan pemilihan responden penelitian menggunakan purposive sampling. Kriteria yang digunakan untuk memilih desa sampel secara geografis: (1) Pemerintah desa yang ada di daerah daratan, dan (2) Pemerintah desa yang berdekatan dengan pusat pemerintahan daerah kabupaten (± 15 km) atas dasar kemudahan dan aktivitas dalam berkonsultasi pada pemerintahan daerah). Atas dasar penentuan sampel, maka diperoleh sebanyak 106 responden.

Instrumen penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor 1-5. Data hasil pengisian instrumen (kuisisioner) dianalisis menggunakan aplikasi SPSS yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas dan multikolenieritas) dan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil pengujian data sebagai berikut.

Tabel 1. Kompetensi Perangkat Desa (X1)

| Item-Total Statistics | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| X2.1 | 30,24 | 8,487 | ,623 | ,452 | ,882 |
| X2.2 | 30,16 | 8,669 | ,641 | ,477 | ,880 |
| X2.3 | 30,08 | 8,261 | ,751 | ,620 | ,869 |
| X2.4 | 30,18 | 8,529 | ,622 | ,504 | ,882 |
| X2.5 | 30,18 | 8,244 | ,720 | ,541 | ,872 |
| X2.6 | 29,98 | 8,685 | ,639 | ,448 | ,880 |
| X2.7 | 30,23 | 8,558 | ,669 | ,481 | ,877 |
| X2.8 | 30,26 | 8,482 | ,671 | ,548 | ,877 |

Sumber: Output SPSS (2021)

Hasil pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa pada variabel kompetensi perangkat desa (X1), yaitu pada kolom *corrected item-total correlation* masing-masing item pertanyaan memperoleh nilai r hitung yang lebih besar dari pada r tabel, ($r \text{ hitung} > 0,160$), sehingga masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel kompetensi (X1) dinyatakan valid.

Tabel 2. Kepemimpinan Kepala Desa (X2)

| Item-Total Statistics | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| X1.1 | 22,00 | 5,143 | ,770 | ,627 | ,858 |
| X1.2 | 22,18 | 5,310 | ,669 | ,534 | ,875 |
| X1.3 | 21,96 | 5,313 | ,721 | ,594 | ,866 |
| X1.4 | 22,11 | 5,225 | ,730 | ,556 | ,865 |
| X1.5 | 22,15 | 5,196 | ,705 | ,578 | ,869 |
| X1.6 | 22,00 | 5,638 | ,632 | ,498 | ,880 |

Sumber: Output SPSS (2021)

Hasil pada tabel 2 di atas dapat kita ketahui bahwa pada variabel kepemimpinan kepala desa (X2), yaitu pada kolom *corrected item-total correlation* masing-masing item pertanyaan memperoleh nilai r hitung yang lebih besar dari pada r tabel ($r \text{ hitung} > 0,160$), sehingga masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel kepemimpinan kepala desa (X2) dinyatakan valid.

Tabel 3. Implementasi Refocusing Anggaran (Y)

| Item-Total Statistics | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| Y1 | 17,38 | 3,834 | ,764 | ,656 | ,836 |
| Y2 | 17,41 | 3,956 | ,739 | ,582 | ,843 |
| Y3 | 17,31 | 3,968 | ,769 | ,630 | ,836 |
| Y4 | 17,64 | 4,137 | ,529 | ,283 | ,896 |
| Y5 | 17,38 | 3,834 | ,764 | ,636 | ,836 |

Sumber: Output SPSS (2021)

Hasil pada tabel 3 di atas dapat kita ketahui bahwa pada variabel implementasi refocusing anggaran (Y) pada pemerintah desa di Kabupaten Sumenep, yaitu pada kolom *corrected item-total correlation* masing-masing item pertanyaan memperoleh nilai r hitung yang lebih besar dari pada r tabel ($r \text{ hitung} > 0,160$), sehingga masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel implementasi *refocusing* anggaran (Y) dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| Reliability Statistics | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------------|
| | Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| Kompetensi Perangkat Desa | ,891 | ,891 | 8 |
| Kepemimpinan Kepala Desa | ,888 | ,888 | 6 |
| Implementasi Refocusing Anggaran | ,876 | ,880 | 5 |

Sumber: Output SPSS (2021) dengan beberapa perubahan

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai alpha pada nilai alpha pada variabel kompetensi perangkat desa (X1) sebesar 0,891, variabel kepemimpinan kepala desa (X2) sebesar 0,888 dan variabel implementasi *refocusing* anggaran (Y) sebesar 0,876, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliabel, karena semua nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,70.

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 106 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | 2,13735174 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,107 |
| | Positive | ,074 |
| | Negative | -,107 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,102 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,176 |

Sumber: Output SPSS (2021)

Hasil dari uji statistik pada tabel 5 di atas dengan metode *kolmogorov smirnov test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,176 ($>0,05$), hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Tabel 6. Uji Multikolonieritas

| Model | | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| | | B | Std. Error | | | | | |
| 1 | (Constant) | 8,604 | 2,408 | | 3,573 | ,001 | | |
| | X2 | -,033 | ,094 | -,036 | -,352 | ,726 | ,677 | 1,477 |
| | X1 | ,406 | ,077 | ,537 | 5,241 | ,000 | ,677 | 1,477 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS (2021)

Berdasarkan dari hasil uji statistik pada tabel 6 di atas dengan metode multikolonieritas, diperoleh nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel adalah $< 1,00$. Besaran nilai *tolerance* yang dimiliki variabel tersebut adalah variabel kompetensi perangkat desa ($0,677 < 1,00$) dan variabel kepemimpinan kepala desa ($0,677 < 1,00$), sehingga disimpulkan telah memenuhi syarat bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel bebas atau independen (nilai *tolerance* $< 1,00$).

| Model | | Coefficients ^a | | | | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | | |
| | | B | Std. Error | | | | Beta | |
| 1 | (Constant) | 4,282 | 1,315 | | 3,256 | ,002 | | |
| | X2 | -,067 | ,051 | -,155 | -,315 | ,191 | | |
| | X1 | -,021 | ,042 | -,059 | -,503 | ,616 | | |

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output SPSS (2021)

Hasil uji *glejser* pada tabel 7 di atas diperoleh nilai signifikansi untuk kompetensi perangkat desa (X1) sebesar 0,616 dan variabel kepemimpinan kepala desa (X2) sebesar 0,191. Maka disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya gejala *heteroskedastisitas* ($>0,05$).

Tabel 8 Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | | Beta | |
| 1 | (Constant) | 8,604 | 2,408 | | 3,573 | ,001 |
| | X2 | -,033 | ,094 | -,036 | -,352 | ,726 |
| | X1 | ,406 | ,077 | ,537 | 5,241 | ,000 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS (2021)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi *refocusing* anggaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumenep. Dibuktikan dengan nilai dari hasil t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($5,241 > 1,659$), sehingga terbukti bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Selain itu, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Kompetensi perangkat desa yang baik adalah yang memiliki pengalaman, tingkat pendidikan, dan sikap yang baik serta pemahaman atas kebijakan *refocusing* anggaran, maka implementasi *refocusing* anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh perangkat desa dalam rangka *refocusing* anggaran juga akan baik dan sesuai dengan pedoman kebijakan yang ada. Hasil ini juga dikuatkan dengan jawaban dari responden terkait dengan item pertanyaan kompetensi perangkat desa yang banyak menjawab setuju dan sangat setuju.

Keberhasilan implementasi *refocusing* anggaran harus didukung juga dengan kompetensi perangkat desa sebagai pelaksana teknis. Oleh karena itu perangkat desa seharusnya memiliki tingkat pengetahuan yang mumpuni terkait dengan pengelolaan pemerintah desa termasuk *refocusing* anggaran, aturan-aturan yang terkait, dan teknis pelaporan yang harus dilakukan. Di samping itu, perangkat desa juga harus memiliki pengalaman terkait *refocusing* anggaran dan pelaporannya, karena tidak

mungkin mampu melaksanakan *refocusing* anggaran dengan baik, kalau tidak memiliki pengalaman yang mumpuni atau paling tidak pengetahuan yang mumpuni.

Selain itu, juga kompetensi perangkat desa juga didukung dengan sikap yang baik, komunikatif, dan mampu bekerjasama secara tim menjadikan proses implementasi *refocusing* anggaran menjadi lebih baik dan efektif. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin & Kaukab (2019), Saputra & Tama (2017), Syarifuddin & Sjarlis (2022).

Lebih lanjut, implikasi dari hasil ini adalah kualitas implementasi *refocusing* anggaran ataupun pengelolaan (keuangan) pemerintah desa sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa. Menjadi penting bagi pemerintah desa dalam melakukan rekrutmen perangkat memperhatikan kompetensi yang dimilikinya, sehingga mampu meningkatkan kinerja dari pemerintah desa tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dari uji hipotesis pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap implementasi *refocusing* anggaran pada pemerintah desa di Kabupaten Sumenep. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,352 < 1,659$) dan nilai signifikansi yang di peroleh variabel kepemimpinan kepala desa lebih besar dari 0,05 ($0,726 > 0,05$).

Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan implementasi *refocusing* anggaran merupakan intruksi presiden yang sifatnya wajib dilaksanakan, sehingga ada atau tidaknya kepemimpinan kepala desa implementasi *refocusing* anggaran tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Muzanni Kepala Desa Torbang Kecamatan Batuan mengatakan bahwa

“kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi *refocusing* anggaran karena *refocusing* anggaran merupakan aturan langsung yang diturunkan pemerintah pusat yang tidak bisa ubah dan pemerintahan desa tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut dan hanya bertugas untuk menjalankan.

Tentunya hal ini berbeda dengan kondisi kepemimpinan kepala dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dan sangat mempengaruhi tingkat akuntabilitas yang didapatkan. Karena kondisi ini butuh peran strategis kepemimpinan kepala desa. Kepala desa yang apatis akan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seperti abai akan bukti-bukti, transparansi penyusunan anggaran, dan partisipasi masyarakat akan mengurangi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diperoleh.

Oleh karena itu, implikasi dari hasil ini adalah peran kepemimpinan kepala desa menjadi vital manakala kinerja yang dijadikan tolak ukur bukan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yang *notabane* nya bukan inisiasi dan inovasi dari kepala desa tersebut. Maka, jika berasal dari kepala desa tersebut dapat dilakukan pengujian akan dampak kepemimpinannya dalam implementasi *refocusing* anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap implementasi *refocusing* anggaran pada pemerintah desa di Kabupaten Sumenep, dan (2) kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap implementasi *refocusing* anggaran pada pemerintah desa di Kabupaten Sumenep, hal ini dikarenakan kepemimpinan kepala desa tidak memiliki

wewenang untuk refocusing anggaran karena refocusing anggaran merupakan aturan yang diturunkan langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa hanya bertugas untuk memerintah dan mengawasi bawahannya, maka hal ini yang membuat kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap implementasi refocusing anggaran pada pemerintah desa. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kompetensi yang dimiliki perangkat desa seperti tingkat pendidikan, pengalaman teknis, dan kreatifitasnya menjadi modal besar dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan dan menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu (1) bagi pemerintah desa senantiasa memperhatikan kompetensi perangkat desa baik mulai rekrutmen ataupun pada saat pemberian tugas agar mampu menghasilkan kinerja yang maksimal, dan (2) bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terkait kompetensi perangkat desa dan kepemimpinan kepala desa tidak hanya pada implementasi *refocusing* anggaran, tetapi terhadap kebijakan lainnya pasca pandemi *covid 19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1), 1–9.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). *Dasar-dasar manajemen keuangan*.
- Bulturbayevich, M. B., Ikromjonovich, T. I., & Mahmudjon o'g'li, H. N. (2021). TYPES OF COMPETENCE. *Conference Zone*, 281–286.
- Feld, L., Schmidt, C., Schnabel, I., & Wieland, V. (2018). Refocusing the European fiscal framework. *VoxEU. Org*, 12.
- Hasman, R. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(11).
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2312–2320.
- Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE UGM.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- Kartika, R. S. (2021). Kinerja ASN Dalam Menghadapi Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 20–41.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic*,

- Business and Engineering (JEBE), 1(1), 118–130.
- Mitchell, T. R., & Scott, W. G. (1987). Leadership failures, the distrusting public, and prospects of the administrative state. *Public Administration Review*, 445–452.
- Patty, T. F. Q., & Ardini, L. (2021). Risiko Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 186–194.
- Rachmadani, W., Suhardjanto, D., Setiawan, D., & Rosadi, S. (2022). Covid-19 Budget Refocusing: Evidence from Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(3), 236–249.
- Rosmaini, R., & Tanjung, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 1–15.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1979). The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives. *Policy Analysis*, 5(4), 481–504.
- Saputra, K. A. K., & Tama, G. M. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan regulasi terhadap penerapan anggaran koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 16(2), 79–90.
- Sedyastuti, K., Suwarni, E., Rahadi, D. R., & Handayani, M. A. (2021). Human Resources Competency at Micro, Small and Medium Enterprises in Palembang Songket Industry. 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020), 248–251.
- Shahbal, S., Al-Kubaisi, H., Khan, A., Ahmad, Z., & Usman, M. (2022). Leadership Styles, Role, And Opportunities; Reflection in Educational Management System. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1452–1460.
- Sriani, N. M. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 618–636.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, E. (2010). Analisis Peranan Leadership Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Manajerial: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*, 9(1), 1–9.
- Syarifuddin, S., & Sjarlis, S. (2022). The Impact of Planning, Budget Implementation, and Human Resources Competency on Budget Absorption. *Public Sector Management and Accounting Research*, 1(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. In Yogyakarta: Media Pressindo. Media Pressindo.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 112–123.
- Zhang, K. (2018). Theory of Planned Behavior: Origins, Development and Duture Direction. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 7(5), 76–83.